



Buletin **Parlementaria**

Taman Nasional Di Seluruh Indonesia Perlu Perhatian Khusus



3 APBN TA 2024
Diarahkan
Percepat
Kesejahteraan
Bersama



20 Baleg DPR RI
Sahkan Jadwal
Rapatnya Masa
Sidang V Periode
2022-2023

Nomor 1246/III/V/2023 • Mei 2023



9 772614 339005



Taman Nasional Di Seluruh Indonesia Perlu Perhatian Khusus



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini bersama tim berkunjung ke Jawa Timur

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah daerah terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dikarenakan konservasi dan perlindungan ekosistem taman nasional harus menjadi prioritas utama. Hal itu diutarakan tim saat berkunjung ke TNBTS, Jawa Timur pada Jumat (12/5).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, dalam kunjungan itu mendorong agar pengelola dan pemerintah terkait dapat meningkatkan manajemen dan pengawasan di taman nasional. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi pemantauan flora dan fauna, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan

sampah, dan penegakan peraturan. Tak lupa pihak terkait, pesannya, dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan taman nasional. Seperti melibatkan masyarakat setempat dalam pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi melalui pariwisata, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan taman nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus juga menyampaikan hal yang sama bahwa ia berharap ada upaya pemantauan yang ketat terhadap flora dan fauna di taman nasional. Serta pihak terkait harus menegakkan peraturan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, dengan pemberian sanksi pidana dan administratif sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

"Kita juga mengharapkan Taman Nasional Bromo dapat tetap menjadi tujuan wisata yang menarik sambil

tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang ada. Program edukasi yang melibatkan pemandu wisata, brosur informatif, dan interpretasi lingkungan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengajak pengunjung untuk bertindak secara bertanggung jawab," ujar Alien.

Selanjutnya, tim melakukan agenda penanaman Bunga Edelweis, sebagai bagian dari kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kekayaan alam Indonesia. Anggia menyampaikan bahwa edelweis bukan hanya sekadar bunga bagi masyarakat Tengger, tetapi juga memiliki nilai religius yang tinggi. Bunga ini sering digunakan dalam kegiatan beribadah oleh masyarakat setempat.

Politisi Fraksi PKB ini mengungkapkan kegembiraannya karena menemukan beberapa varian edelweis yang dapat ditanam dan dibudidayakan. Ia menyampaikan apresiasi kepada sekitar 30 masyarakat Tengger yang terlibat dalam usaha budidaya edelweis. "Saya berharap masyarakat ikut terlibat dalam melestarikan dan menjaga keberadaan edelweis ini dengan lebih baik," ungkap Anggia.

Dengan penemuan-penemuan langka ini, diharapkan upaya konservasi dan budidaya edelweis dapat semakin ditingkatkan. Masyarakat Tengger diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan tumbuhan langka ini demi keberlanjutan budaya dan keindahan alam TNBTS.

 upi/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





APBN TA 2024 Diarahkan Percepat Kesejahteraan Bersama



FOTO: KRESNO/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pada Masa Persidangan V ini, agenda utama Alat Kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN.

Prioritas APBN Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia. "Program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama, program-program yang mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat,"

papar Puan, Selasa (16/5).

Puan memaparkan, seluruh Alat Kelengkapan DPR RI dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta kebijakan belanja di Kementerian dan Lembaga, untuk APBN Tahun Anggaran 2024, dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk manfaat rakyat.

"Marilah kita, Anggota DPR RI Yang Terhormat, bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, berdemokrasi secara berkeadaban, serta memiliki integritas kehormatan sesuai dengan kedudukannya," ajak Puan kepada para Anggota Dewan.

ssb/rdn



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauziral, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mublien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhilla, Geraldie Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Gus Imin Tawarkan Gagasan Transmigrasi Modern Transpolitan



FOTO: RUMI/HAN

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai program transmigrasi merupakan program yang berhasil. Menurutnya, transmigrasi saat ini telah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak ±2,2 juta kepala keluarga atau ±9,2 juta jiwa.

"Saya melihat program transmigrasi ini sebagai program yang berhasil. Program ini sukses memindahkan, menata dan juga menempatkan kurang lebih 2,2 juta kepala keluarga, atau kalau jumlah seluruhnya mencapai 9,2 juta jiwa,"

kata legislator yang akrab disapa Gus Imin saat menghadiri Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (16/5).

”

PROGRAM INI MAMPU MENYELENGGARAKAN PERENCANAAN HINGGA PENEMPATAN TRANSMIGRAN HANYA DALAM WAKTU KURANG DARI 1 TAHUN.

Terkait dengan Rakornas tersebut, Gus Imin mendorong adanya perubahan transmigrasi dari konsep tradisional menjadi modern dan berasas transpolitan. Ia menjelaskan, paradigma modernitas dalam program transmigrasi merupakan suatu keharusan.

"Konsep transmigrasi modern ini sebetulnya sudah ditawarkan sejak Tahun 2018 yang dikenal sebagai transmigrasi transpolitan, untuk menjawab berbagai permasalahan transmigrasi yang tengah dihadapi saat ini. Program ini mampu menyelenggarakan perencanaan hingga penempatan transmigran hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun," urainya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan bahwa transmigrasi modern transpolitan merupakan salah satu upaya yang bersama untuk meningkatkan eksistensi program transmigrasi dalam percepatan pembangunan wilayah maupun pemerataan persebaran penduduk di Indonesia.

Ia berujar, keberhasilan transmigrasi bukannya keberhasilan Kemendesa PDTT semata melainkan keberhasilan banyak pihak yang terlibat. Ia mendorong adanya kolaborasi antar sektor untuk membangun dan mengembangkan transmigrasi.

"Pemerintah bersama dengan DPR, selaku representasi rakyat, di parlemen bekerja bahu-membahu mewujudkan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Kita saling bermitra, saling mendukung untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat NKRI," tukasnya. [uc/rdn](https://www.ri.go.id)



Rachmat Gobel Sarankan Pemerintah Fokus Subsidi Petani Dibanding Mobil Listrik

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyoroti kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kendaraan (mobil) listrik. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.

Gobel mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu. "Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" ujar Gobel dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Senin (15/5).

Gobel mengatakan pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan. Maka

dari itu, tegasnya, Pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. "Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," tandas Gobel.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan. Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp29,1 triliun, pada 2022 Rp25,3 triliun, dan pada 2023 Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Gobel mengaku ia selalu menerima pengaduan dari para petani yang mengadu sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam. Namun, saat

panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.

Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN juga disebut tidak kalah penting. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa. Maka dari itu, Gobel mengatakan DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi kendaraan listrik. **pun/rdn**

**Wakil Ketua DPR RI
Rachmat Gobel.**

FOTO: AZKA/HAN

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wacana Revisi UU TNI, Legislator Nilai Butuh Proses yang Panjang

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih sebatas rencana yang digodok oleh tim khusus Mabes TNI. Ia menilai revisi UU tersebut membutuhkan waktu yang panjang hingga akhirnya dibahas di DPR bersama pemerintah dan harus melibatkan publik.

"Itu masih usulan dan masih digodok oleh tim di Mabes TNI. Prosesnya masih panjang salurannya ke panja pemerintah yang di dalamnya ada Menhan, Menkumham dan lainnya," ujar Hasanuddin, dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Selasa (16/5).

”

JADI KETIKA ADA DISHARMONISASI YA LAKUKAN SAJA JANGAN KEMUDIAN BERPIKIR SEKTORAL. KEDUANYA JANGAN BERPIKIR SEKTORAL. SEHINGGA JANGAN MERUBAH UU HANYA KARENA KURANG KOORDINASI. MISALNYA KEMENHAN KALAU MAU BELI ALUTSISTA KOORDINASI DENGAN TNI.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, Panja nantinya akan menyempurnakan beleid tersebut jika memang diterima oleh pemerintah yang kemudian diserahkan ke DPR. "Mari kita bahas mana yang klausul yang bermasalah. Saya siap untuk membahasnya bersama dan ini harus terbuka (pembahasan)," tambahnya.

Dalam beleid yang sedang dibahas di internal TNI tersebut Hasanuddin juga mengkritisi klausul tentang tupoksi TNI. Hal ini menjadi masalah pertahanan dan keamanan yang menentang UUD 1945 dan UU Pertahanan. "Kalau tupoksi itu di bidang pertahanan dan keamanan memang seperti ABRI dulu. Bisa jadi menterinya bukan menteri pertahanan," jawab Hasanuddin.

Kedua sambung dia adanya usulan dari TNI terkait anggaran yang tidak lagi diusulkan melalui menteri. Dalam UU TNI disebutkan anggaran TNI di bawah koordinasi Kemenhan. "Mengapa di bawah koordinasi karena setiap kegiatan upaya dan operasi TNI bagian dari tugas pertahanan dan masalah pertahanan itu kebijakannya ada di menteri pertahanan sehingga jangan jika kemudian anggaran itu dilakukan langsung ke Kemenkeu," tegasnya.

Dia meminta TNI dan Kemenhan untuk memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi terkait anggaran. Hal ini penting agar tidak terjadi pola pikir dan sikap sektoral yang kemudian merevisi undang-undang. "Jadi ketika ada disharmonisasi ya lakukan saja jangan kemudian berpikir sektoral. Keduanya jangan berpikir sektoral. Sehingga jangan merubah UU hanya karena kurang koordinasi. Misalnya Kemenhan kalau mau beli alutsista koordinasi dengan TNI," tandasnya. **tn/aha**

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.



FOTOUR/AN/AHA

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Stabilitas Laut China Selatan



FOTO: RUMAHAN

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid secara resmi menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Korea Selatan di Ruang Delegasi Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (15/5). Meutya mengungkapkan banyak isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya adalah mengenai komitmen kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan dan keamanan.

"Kita juga membahas kerja sama terkait pengembangan alat keamanan. Kita pernah bekerja sama dengan (membangun) kapal selam, bersama PT PAL kemudian kita juga membangun pesawat tempur KFX IFX (*Korea Fighter Xperiment/ Indonesia Fighter Xperiment*) yang sudah dilakukan April 2022. Jadi ini yang akan diteruskan kerja sama

”

JADI INI YANG AKAN DITERUSKAN KERJA SAMA PERTAHANAN KE DEPAN, TIDAK HANYA UNTUK ALUTSISTANYA, TETAPI JUGA KONTAK ANTARA MILITARY TO MILITARY.

pertahanan ke depan, tidak hanya untuk alutsistanya, tetapi juga kontak antara *military to military*," jelas Meutya.

Dalam pertemuan ini juga ikut dibahas mengenai pentingnya peran kedua negara dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan, terutama di kawasan Laut China Selatan (LCS). "Terutama dengan meningkatnya tensi di Laut China Selatan. Jadi Indonesia dan Korea

punya peran yang sangat besar untuk membantu mengamankan kawasan dan menyuarakan dalam berbagai forum internasional mengenai pentingnya perdamaian di kawasan," sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini menjelaskan pertemuan antar parlemen ini akan lebih intens diselenggarakan mengingat budaya Korea Selatan juga menjadi salah satu yang cukup populer di Indonesia. Sehingga, pertemuan antara *people to people* ini dianggap penting.

"(Parlemen Korea Selatan) juga tadi menyampaikan komitmen untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) bersama-sama, komitmen juga untuk membantu Indonesia dalam membangun IKN, kemudian juga (komitmen) membangun industri pertahanan yang mandiri, dan *people to people contact*. Jadi, lebih banyak pertemuan *parliament to parliament*," tutupnya. [we/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Peraturan KPU Tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Tetap Dilaksanakan

Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tetap konsisten melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membacakan kesimpulan rapat, setelah sebelumnya masing-masing poksi menyampaikan pendapatnya untuk tetap konsisten melaksanakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

"Tadi sudah kita dengarkan sama-sama suara dari sembilan Poksi di Komisi II, dan suaranya sama bahwa PKPU Nomor 10 tahun 2023 itu tidak perlu ada perubahan. Jadi kita tetap konsisten," jelas Doli dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU, BAWASLU, DKPP dan Dirjen Polpum Kemendagri, Rabu (17/5).

Menurutnya, dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 sudah relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terutama pasal 245 yang membangkitkan kesadaran pada seluruh partai politik. "Jadi PKPU nomor 10 tahun 2023 ini sebetulnya sudah secara tidak langsung sudah membangun kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30% (kepesertaan bakal calon legislatif perempuan) itu," terangnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada satu partai politik pun yang

”

JADI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 INI SEBETULNYA SUDAH SECARA TIDAK LANGSUNG SUDAH MEMBANGUN KESADARAN DAN KESEPAHAMAN KEPADA SELURUH PARTAI POLITIK UNTUK MEMENUHI SYARAT MINIMAL 30% (KEPESERTAAN BAKAL CALON LEGISLATIF PEREMPUAN) ITU.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

kepesertaan bakal calon legislatif perempuannya kurang dari 30%. Sehingga hal ini juga membuktikan bahwa semua partai memahami dan menyadari terkait pentingnya regulasi tersebut.

"Saya barusan dikirim tadi data dari teman-teman komisioner, data dari jumlah bakal calon legislatif perempuan dari seluruh partai itu kalau ditotal (dirata-rata) itu jumlahnya 37,6%. Ini sudah jauh diatas 30%. Artinya PKPU ini tidak membuat masalah baru atau tidak memunculkan kekhawatiran," tutupnya.

we,hfl/aha



FOTO: MENTARI/HAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Tetap Dukung tindakan Afirmatif Kuota Perempuan 30 Persen

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mewakili Fraksi Partai Golkar menyampaikan pihaknya tetap mendukung *affirmative action* atau tindakan afirmatif terhadap kuota perempuan 30% sebagaimana tertera Pasal 8 ayat (2) tentang aturan teknis penghitungan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

"Sebagai penjabaran dari undang-undang nomor 7 2017 KPU melalui PKPU Nomor 10 2023 telah mengeluarkan peraturan sebagaimana tertera di dalam pasal 8 ayat 2 Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar tetap mendukung *affirmative action* kuota perempuan 30%," jelasnya dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU, BAWASLU, DKPP dan Dirjen Polpum Kemendagri, Rabu, (17/5).

Menurutnya, Fraksi Partai Golkar tetap memberikan

”

PEMILU TERKAIT DENGAN KUOTA PEREMPUAN TETAP Mendukung BERDASARKAN ATURAN PKPU SEBAGAIMANA TELAH DILAKSANAKAN MELALUI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023

prinsip-prinsip ketaatan terhadap asas-asas secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan telah memenuhi rumusan *affirmative action* yang ditetapkan.

"Alhamdulillah dalam pendaftaran ke KPU kemarin Fraksi kami telah memenuhi rumusan *affirmative action* yang diharapkan oleh sahabat-sahabat perempuan di dalam peran serta partai politik," jelasnya.

Diakhir, Agung menegaskan jika Pemilu harus tetap dilaksanakan tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. "Pemilu terkait dengan kuota perempuan tetap mendukung berdasarkan aturan PKPU Sebagaimana telah dilaksanakan melalui PKPU Nomor 10 tahun 2023," tegasnya.

we/aha

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MENTARI/AHA

Komitmen DPR Bahas RUU Perampasan Aset untuk Kepentingan Bangsa

Pemerintah telah mengirimkan draf RUU Perampasan Aset kepada DPR melalui Surat Presiden (Surpres) tertanggal 4 Mei 2023. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan, DPR berkomitmen penuh untuk membahas RUU tersebut dengan penuh kehati-hatian

"Saya tegaskan bahwa ketika ada yang meragukan komitmen DPR untuk tidak membahas RUU Perampasan Aset, maka jangan ragukan komitmen. DPR berpikir untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, demi kemakmuran Rakyat Indonesia," ujarnya kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan, Komisi III akan menunggu penugasan pembahasan RUU tersebut dari Pimpinan DPR. "DPR nanti akan menunjuk apakah larinya ke Baleg atau ke Komisi III, saya rasa ke Komisi III ya. Setelah nanti pimpinan dalam masa persidangan ini membawa ke Komisi III, maka Komisi III akan menyusun sebuah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) setelah itu kita akan rapat bersama pihak pemerintah," jelasnya.

Terhadap pembahasan RUU tersebut, Komisi III juga berkomitmen untuk membahasnya dengan sedetail mungkin. Sehingga isinya tidak bertabrakan dengan undang-undang yang sudah ada. "Kita membuatnya penuh dalam kehati-hatian, supaya tidak bertabrakan dengan UU

”

SAYA TEGASKAN BAHWA KETIKA ADA YANG MERAGUKAN KOMITMEN DPR UNTUK TIDAK MEMBAHAS RUU PERAMPASAN ASET, MAKA JANGAN RAGUKAN KOMITMEN. DPR BERPICIR UNTUK KEPENTINGAN BANGSA, KEPENTINGAN NEGARA, DEMI KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa.

eksisting sekarang ini, kita tidak bisa melahirkan UU yang bertabrakan dengan UU yang lain.

Terakhir, Supriansa meminta kepada semua pihak dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa agar pembahasan RUU ini bisa diselesaikan dengan baik. "Saya minta kepada semua pihak dan masyarakat untuk mendoakan bahwa apa yang menjadi usulan daripada pemerintah, RUU Perampasan Aset bisa kita selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan tidak ada kendala," harap Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.

— bia/rdn

FOTO: RUMI/AHA



Scan QR untuk berita selengkapnya



Arsul Sani: Jabatan Pimpinan KPK Cukup Tiga Tahun

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup tiga tahun. Hal ini disampaikan Arsul dalam rangka menanggapi usul perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga rasuah itu dari semula empat tahun menjadi lima tahun.

"Saya kira itu sudah pas. Bahkan kalau perlu dikurangi. Menurut saya jangan empat tahun cukup tiga tahun saja pimpinan KPK yang akan datang," kata Arsul kepada media, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

Arsul mengingatkan makin lama suatu masa jabatan, maka potensi penyalahgunaan

”

SAYA KIRA ITU SUDAH PAS. BAHKAN KALAU PERLU DIKURANGI. MENURUT SAYA JANGAN EMPAT TAHUN CUKUP TIGA TAHUN SAJA PIMPINAN KPK YANG AKAN DATANG.

Anggota Komisi III DPR RI
Arsul Sani.

kekuasaan juga makin besar. Menurut dia, wajar jika masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan lembaga lainnya.

"Apalagi kewenangannya itu dilengkapi dengan upaya paksa, makin lama menjabat itu potensi ini baru potensi ya, potensi *abuse of power*-nya itu juga tinggi," ujar Politisi Fraksi PPP itu.

Sebab, kata Arsul, ada kekhususan yang melekat pada komisioner KPK, seperti kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan. Karena itu, masa jabatannya lebih pendek.

"Jadi, karena ada perbedaan, ada kekhususan yang melekat pada pejabat negara yang bernama komisioner KPK itulah makanya undang-undang kemudian membedakan, lebih pendek," tegasnya.

Diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajukan permohonan uji materi atau *judicial review* UU KPK terkait masa jabatan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mulanya ia menggugat pasal yang mengatur soal batas usia pimpinan KPK. Namun, dalam perjalanannya, ia memperbaiki permohonan dengan mempermasalahkan masa jabatan empat tahun pimpinan KPK.

Ghufron menyebut niatnya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu untuk menyesuaikan dengan lembaga-lembaga lainnya. Adapun masa jabatan Ghufron sebagai pimpinan KPK akan berakhir pada tahun ini. Ia berencana maju kembali sebagai pimpinan KPK, tetapi terkendala aturan batas usia. **— sbb/rdn**



FOTO: JAKA/AHA

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dukung Pengurangan Emisi Penerbangan Internasional



FOTO: ARIEF/AHA

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae foto bersama usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *International Civil Aviation Organization* (ICAO) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional akan mengikuti semua protokol upaya dukungan pengurangan emisi di semua sektor penerbangan internasional sesuai ketentuan ICAO. Sebagaimana, Indonesia juga mematuhi protokol upaya pengurangan emisi di sektor pelayaran internasional melalui regulasi dari *International Maritime Organization* (IMO).

"Komisi V DPR RI menyambut baik atas kebijakan Uni Eropa yang menetapkan target yang mengikat bagi maskapai penerbangan di Eropa untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan sebagai upaya untuk memulai pasar bahan bakar ramah lingkungan dan mengurangi tingkat karbon sektor penerbangan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa, di Gedung Nusantara III DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan perjanjian komprehensif transportasi udara ASEAN-Uni Eropa merupakan perjanjian transportasi udara antar blok yang pertama di dunia dan mencerminkan pemikiran kebijakan terbaru dalam regulasi transportasi udara. Perjanjian komprehensif transportasi udara ASEAN-Uni Eropa, sambung Ridwan, juga telah ditandatangani pada pertemuan Menteri Perhubungan se-ASEAN yang ke-28 di Bali pada tanggal 16-17 Oktober 2022 yang lalu.

Disisi lain, pada kesempatan itu Ridwan mengungkapkan kesepakatan *ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement* (AECATA) memberikan landasan untuk kerjasama yang lebih erat antara ASEAN dengan Uni Eropa antara lain kesepakatan tentang pertukaran hak angkut lalu lintas antar kedua regional, kerjasama yang lebih komprehensif terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan, manajemen lalu lintas

udara, perlindungan konsumen serta isu sosial dan lingkungan.

Maka, ungkap Ridwan, dirinya perlu menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI juga telah melahirkan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan sebagai payung penyelenggaraan sektor penerbangan di Indonesia. "Yang tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan namun juga telah memprioritaskan aspek penerbangan berkelanjutan dan mengakomodir aspek lingkungan hidup dimana pengurangan emisi merupakan salah satu parameter penting," tandas Ridwan.

Sementara itu, pimpinan delegasi Parlemen Uni-Eropa, Marian-Jean Marinescu, dalam pertemuan itu memaparkan bahwa Parlemen Uni-Eropa juga melakukan skema untuk pengurangan emisi. Selain itu, ia mengapresiasi Komisi V DPR RI yang memaparkan kerjasama ASEAN-Uni Eropa. Kerjasama tersebut disebutkan merupakan suatu langkah yang sangat bagus. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kementerian BUMN Harus Tanggung Jawab Dugaan Bocornya 15 Juta Data Nasabah BSI

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta Kementerian BUMN turut bertanggung jawab atas dugaan bocornya 15 juta data nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebocoran tersebut dilakukan oleh kelompok *ransomware* LockBit 3.0 pada Selasa (16/5). Menurutnya, peretasan ini harus disikapi oleh pemerintah dengan bergerak cepat mitigasi dan melindungi data nasabah.

"Harus ada langkah-langkah mitigasi untuk mencegah munculnya aksi kejahatan terhadap nasabah dengan penyalahgunaan data pascaserangan *ransomware*. Kementerian BUMN harus ikut bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan instansi terkait keamanan siber," tegas Amin Ak dalam keterangan tertulis kepada Parlemen, Selasa (16/5).

Diketahui, kelompok *ransomware* LockBit 3.0 mengklaim telah menyebarkan semua data itu di dark web setelah sejumlah permintaan uang yang diminta tak dipenuhi BSI. Data sekitar 80 persen nasabah diklaim telah dicuri saat kelompok tersebut melumpuhkan sistem teknologi informasi (IT) Bank BSI dari Senin (8/5/2023) hingga Kamis (11/5/2023) lalu.

Grup peretas asal Rusia, Lockbit, mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber yang melumpuhkan semua layanan BSI. Peretasan ini adalah jenis serangan siber yang biasa disebut *ransomware*. Peretas mengenkripsi data-data berharga

milik target kemudian meminta sejumlah uang untuk membukanya kembali.

Amin menambahkan, Kementerian BUMN yang bertugas membina dan mengawasi manajemen bank-bank BUMN tidak bisa lepas tangan. Pasaunya, peretasan sistem IT bank-bank BUMN sudah beberapa kali terjadi. Hal itu menunjukkan pertahanan siber bank-bank di Indonesia tidak kuat.

Pada 2021, Bank Jatim dan BRI Life (perusahaan asuransi milik BRI) diretas dan data pribadi nasabah diduga bocor di internet. Bahkan awal 2022 silam Bank Indonesia mengaku kena serangan *ransomware*. Ia

mengaku heran karena banyaknya serangan tidak dijadikan pelajaran oleh perbankan di Indonesia. Ia pun turut mendorong digitalisasi semua layanan perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau *cashless society*.

Menutup pernyataannya, Amin juga mendesak manajemen Bank BSI untuk berani membuka hasil investigasi digital forensik terhadap serangan siber sistem IT Bank BSI. Bagaimanapun nasabah

membutuhkan jaminan keamanan atas data pribadi mereka.

— **bia/rdn**

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK.



FOTO: DOK/AHA



Pembangunan Penambahan Kapasitas PLTU Lontar Diharapkan Perkuat Pasokan Listrik Jakarta



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menegaskan peningkatan pengembangan pembangunan PLTU Banten 3 Lontar POMU di Provinsi Banten berkapasitas 1x115 megawatt, akan memperkuat sistem kelistrikan di Jawa Bali. Sehingga, dengan adanya peningkatan tersebut dapat memperkuat pasokan listrik di Jakarta dan sekitarnya.

"Komisi VII DPR berharap agar pembangunan penambahan PLTU Lontar Extension ini dapat

”

KOMISI VII DPR BERHARAP AGAR PEMBANGUNAN PENAMBAHAN PLTU LONTAR EXTENSION INI DAPAT MEMPERKUAT PASOKAN LISTRIK JAKARTA DAN SEKITARNYA DALAM SISTEM KELISTRIKAN JAWA BALI.

memperkuat pasokan listrik Jakarta dan sekitarnya dalam sistem kelistrikan Jawa Bali," ungkap Dony Hal saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU 3 Lontar POMU di Provinsi Banten, Senin (8/5).

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga berharap dengan adanya peningkatan kelistrikan itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, pemanfaatan fasilitas, dan bantuan untuk masyarakat sekitar serta program-program lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat.

Diketahui, selama pertemuan, Komisi VII memperoleh informasi mulai dari pelaksanaan kegiatan di PLTU Lontar, permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya keterlambatan *Commercial Operational Date* PLTU Lontar Extension, hingga dukungan yang dibutuhkan serta kontribusi yang telah dan akan dilakukan oleh PLTU Lontar Banten.

"Kunjungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Komisi VII DPR RI dan mitra kerja yaitu PT PLN Persero dalam hal ini PT Indonesia Power dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yakni sistem perekrutan yang selama ini dianggap sulit oleh masyarakat sekitar wilayah PLTU Lontar Banten dan juga khususnya permasalahan dalam sektor ketenagalistrikan," ujarnya. iIn/rdn



Legislator Minta Tambahan 8.000 Kuota Haji Diprioritaskan Untuk Jemaah Lanjut Usia

Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jemaah haji. Tambahan ini sudah masuk dalam sistem e-Haji, aplikasi pemvisaan Arab Saudi. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak Arab Saudi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi tambahan 8.000 kuota haji untuk Indonesia. Ia meminta pemerintah memprioritaskan tambahan kuota haji untuk calon jemaah haji lanjut usia.

"Tahun lalu pemberian kuota haji sebesar 10.000 tapi kenapa sekarang jadi 8.000? seharusnya kan lebih ya. Pemerintah harus cermat jangan sampai tambahan kuota haji ini tidak terserap secara maksimal apalagi banyak Jemaah lansia yang belum berangkat hingga kini," sebut Politisi PKS tersebut dalam rapat kerja Komisi VIII, Rabu (17/5).

"Untuk anggarannya nanti juga akan disesuaikan harapannya juga terserap secara maksimal, kemudian yang harus diprioritaskan selain lansia adalah jemaah yang sudah lunas pembayaran hajinya sejak lama," imbuh HNW.

Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota

”

**TAHUN LALU
PEMBERIAN KUOTA
HAJI SEBESAR
10.000 TAPI KENAPA
SEKARANG JADI 8.000?**

jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Mereka sudah melakukan proses pelunasan sejak 11 April-5 Mei 2023. Masih ada 14.356 jemaah yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H sehingga prosesnya diperpanjang hingga 12 Mei 2023. **tn/aha**



Anggota Komisi VIII DPR RI
Hidayat Nur Wahid.

FOTO: EKI/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Legislator Ungkapkan Sejumlah Persoalan Calon Jemaah Haji Daerah

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mempertanyakan berbagai hal terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satunya keluhan dari calon jemaah haji asal daerah pemilihannya Riau I yang belum mendapatkan koper. Padahal kloter pertama direncanakan akan diberangkatkan pada 26 Mei 2023 mendatang.

"Ada beberapa catatan kami terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Salah satunya keluhan dari calon jemaah haji di dapil saya. Sebagaimana diketahui kloter pertama akan berangkat pada 26 Mei 2023, namun hingga saat ini koper haji belum juga diterimanya," ujar Achmad saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan jajarannya di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/5).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai pendistribusian koper-koper ke daerah terbelang terlambat untuk tahun ini. Hal itu mengingat pembuatan koper haji itu tersentral ke Jakarta, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk didistribusikan ke daerah. Meskipun persoalan koper bukan hal besar, namun hal ini menurutnya ikut mempengaruhi kesiapan dan persiapan pribadi dari calon jemaah haji, terlebih lagi yang termasuk dalam kloter pertama.

Selain persoalan koper, Achmad juga mendapat aduan seputar persediaan vaksin meningitis yang selama ini menjadi salah satu syarat

perjalanan haji. Diungkapkannya, selama ini vaksin meningitis baru diberikan oleh Kementerian Kesehatan bagi Jemaah calon haji yang sudah melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Persoalan muncul ketika jemaah calon haji itu masuk dalam daftar cadangan, waktu yang diberikan sangat sempit, sementara ketersediaan vaksin di daerah terbatas. Pihaknya berharap agar pemberian vaksin meningitis yang dilakukan oleh Kementerian

Kesehatan jangan menunggu pelunasan BPIH.

"Intinya, Kami berharap agar kualitas peningkatan pelayanan haji tahun ini bisa ditingkatkan. Mulai dari berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci, termasuk melaksanakan ibadah hajinya, serta pasca ibadah haji dapat berjalan baik lancar," pungkas Achmad. [@ayu,au/aha](#)

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad.



FOTO: RINI/HAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perlu Koordinasi Efektif Antar Kementerian-Lembaga Cegah TPPO

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebenarnya sudah bagus untuk mengatur tentang TPPO. Sehingga, masih maraknya TPPO terjadi di Indonesia menurutnya harus dapat ditindak dengan tegas. Utamanya oknum-oknum yang terkait dengan TPPO tersebut.

"Kita tidak sekedar berbicara bagaimana Kementerian Tenaga Kerja atau BP2MI tapi juga aparat keamanan maupun imigrasi ini penting sekali. Oknum-oknum dari pihak keamanan yang seharusnya menjaga malah mem-*backing* ini yang terjadi. Sehingga masyarakat yang pergi keluar negeri dengan iming-iming gaji besar padahal sebenarnya kontraknya tidak jelas seharusnya tidak pergi keluar negeri dengan sembarangan," jelasnya kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

Dalam hal ini, Irma menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antar kementerian/lembaga baik Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), aparat penegak hukum maupun imigrasi untuk mencegah TPPO terjadi. "Ini tidak dapat bekerja sendiri-sendiri harus secara komprehensif. Jika tidak (koordinasi), maka tidak akan bisa hal-hal seperti ini dicegah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Irma juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dari pemerintah agar

masyarakat lebih teredukasi terkait mendapat pekerjaan ke luar negeri secara legal. Sebab, menurutnya, banyak korban TPPO merupakan masyarakat di daerah yang kurang sosialisasi dari pemerintah.

"Hal ini yang harus dijadikan perhatian Pemda, Pemda jangan

”

OKNUM-OKNUM DARI PIHAK KEAMANAN YANG SEHARUSNYA MENJAGA MALAH MEM-BACKING INI YANG TERJADI.

hanya mengandalkan pemda dan pusat juga harus berkoordinasi bersama-sama. Itu yang menurut saya yang harus diperhatikan oleh pemerintah," jelas Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Diketahui, pemerintah dan kepolisian sedang berupaya memulangkan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Puluhan WNI tersebut diperdagangkan kepada sindikat untuk dipekerjakan sebagai *scammer* atau pelaku penipuan online. Bareskrim Polri dalam hal ini juga telah menangkap dua tersangka kasus TPPO tersebut. ➡ **bia/rdn**



FOTO: RINI/HAN

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Mental Pantang Menyerah Jadi Kekuatan Timnas Sepak Bola Indonesia Raih Medali Emas SEA Games

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira memberikan apresiasi atas kemenangan yang diraih oleh Timnas U-22, yang dikenal dengan julukan Garuda Muda, pada ajang SEA Games. Ia mengungkapkan bahwa mental pantang menyerah menjadi kekuatan bagi Indonesia dalam pertandingan final tersebut.

Dengan sangat fantastik, dramatis, dan acung jempol yang luar biasa, kita memberikan apresiasi kepada Garuda Muda, Timnas U-22 yang meraih medali emas dengan skor yang sangat meyakinkan 5-2, mengalahkan Thailand dalam final sepak bola SEA Games," ungkap Andreas melalui keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, Rabu (17/5).

Ia juga menekankan bahwa mental bertanding yang pantang menyerah menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengalahkan dua tim yang selama beberapa tahun terakhir dianggap sebagai 'monster' yang menakutkan, yaitu Vietnam di babak semifinal dan Thailand di final. Tak hanya itu, dirinya juga berharap kemenangan ini akan menjadi awal yang baik bagi perkembangan sepakbola Indonesia.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan harapannya bahwa kepemimpinan Erick Tohir di PSSI bersama dengan tim pelatih yang solid, baik di bawah Indra Sjafri maupun Shin Tae Yong, akan menjadi pemicu perubahan dalam prestasi

sepakbola Indonesia yang selama ini stagnan. Ia mengaku terkesan dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Garuda Muda.

"Saya merasa haru dan kebanggaannya saat melihat bendera Merah Putih berkibar sambil Indonesia Raya berkumandang. Terima kasih kepada Garuda Muda atas prestasi yang telah diraih," pungkasnya.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 setelah melalui pertandingan dramatis selama 120 menit melawan Thailand dalam pertandingan final. Timnas sepak bola Indonesia berhasil mencatat sejarah sebagai juara SEA Games 2023 di

Kamboja setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dalam pertandingan final yang sarat dengan drama di National Olympic Stadium, Phnom Penh, pada Selasa malam (16/5).

Pertandingan tersebut penuh diwarnai dengan drama. Mulai dari, adu fisik yang keras, enam kartu merah, hingga selebrasi prematur dari para pemain, ofisial, dan pelatih Indra Sjafri. Perjuangan Garuda Muda untuk mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun tidaklah mudah. — ts/rdn

Anggota Komisi X DPR RI
Andreas Hugo Pareira.



FOTO: DEM/ AHA

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kasus Serangan Siber BSI Jadi Pelajaran Mahal bagi Sistem IT Perbankan

Terganggunya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu disinyalir merupakan dampak dari serangan siber berupa *ransomware* yang dilakukan sekelompok peretas yang menamai dirinya 'LockBit Ransomware Group'. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi dunia perbankan tanah air untuk mulai memberikan perhatian lebih kepada pengamanan sistem yang digunakan.

"Ini menjadi cobaan sekaligus tantangan juga proses pembelajaran bagi dunia perbankan di Indonesia. (Yaitu) bagaimana membangun sistem IT (*information technology*), membangun digitalisasi dan di sana ada aspek yang selama ini sangat penting yaitu *security*. Inilah yang menurut saya menjadi tantangan ke depan dan harus menjadi pembelajaran pembelajaran yang sangat mahal," ujar Misbakhun saat ditemui **Parlementaria** di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/5).

Disampaikan oleh Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu, aspek pengamanan dan keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Menurutnya, meski mampu memiliki basis data dan sistem IT yang canggih namun apabila tidak bisa mengamankan sistem yang digunakan, maka akan memberi celah pada timbulnya masalah baru. Misbakhun pun menyinggung adanya permintaan tebusan untuk membuka file-file yang dicuri dan terkunci.

"Saya dengar juga berkaitan dengan urusan peras-memeras. Bagaimana para *hacker* itu berusaha memeras dengan jumlah uang

”

INI MENJADI COBAAN SEKALIGUS TANTANGAN JUGA PROSES PEMBELAJARAN BAGI DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA. (YAITU) BAGAIMANA MEMBANGUN SISTEM IT (INFORMATION TECHNOLOGY).

yang sangat besar dan itu tidak ada di dalam protokol penanganan krisis. Nah ini kan juga harus dibuat nanti ke depan bagaimana cara mengamankannya," kata Legislator Dapil Jawa Timur II itu.

Dilansir dari berbagai sumber, *ransomware* merupakan jenis *malware* atau perangkat lunak berbahaya, yang membuat data atau perangkat korbannya terkunci. Untuk membuka dan mengembalikan data yang 'tertawan' biasanya para peretas meminta sejumlah tebusan seperti yang terjadi pada kasus BSI ini.

uc/rdn

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.



FOTO: AHA

Scan QR untuk berita selengkapnya



Baleg DPR RI Sahkan Jadwal Rapatnya Masa Sidang V Periode 2022-2023

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Nurdin telah mengesahkan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Sidang V mulai 16 Mei-13 Juli Tahun Sidang 2022-2023. Dalam jadwal acara rapat yang disepakati Pimpinan dan Anggota Baleg di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Selasa (16/5), Baleg akan melanjutkan RDP dengan pakar untuk mendapatkan pandangan dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Di penghujung Bulan Mei Baleg akan Mengambil Keputusan/ Pendapat Mini Fraksi atas hasil harmonisasi RUU tentang POM. Setelah itu, Pada 31 Mei Baleg akan melakukan Rapat Dengarkan

Pendapat (RDP) dengan agenda mendengarkan penjelasan dari Pengusul RUU/Pimpinan Komisi VII atas RUU tentang Migas.

Lalu, pada awal Juni, Baleg melakukan RDP membahas rencana pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian pada 7 Juni, Baleg melanjutkan RDPU untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari OJK atas pelaksanaan UU tentang Perasuransian. Kemudian, Pada 8 Juni, Baleg melakukan rapat Panja dengan agenda melanjutkan harmonisasi RUU tentang Migas dan ditutup dengan pengambilan Keputusan. Pendapat Mini Fraksi atas

hasil harmonisasi RUU tentang Migas.

Kemudian, tanggal 12 Juni Badan Legislasi melakukan Rapat untuk mendengarkan presentasi awal draf RUU tentang Komisi Yudisial dilanjutkan mendengarkan masukan/ pandangan Narasumber atas penyusunan RUU tentang Komisi Yudisial. Pertengahan Juni Baleg melakukan Rapat untuk pengambilan Keputusan. Pendapat Mini Fraksi atas penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Pada 28 Juni Baleg juga akan mengambil Keputusan hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU tentang Perasuransian.

Di awal Juli, Badan Legislasi akan melakukan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU tentang Komisi Yudisial. Kemudian, pada 6 Juli Baleg akan mengambil Keputusan/ Pendapat Mini Fraksi atas Penyusunan RUU tentang Komisi Yudisial. Sedangkan 10-12 Juli, Baleg akan membahas hasil kajian harmonisasi atas 27 RUU tentang Kabupaten/Kota dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi atas 27 RUU tentang Kabupaten/Kota.

— rnm/aha

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Nurdin.



FOTO: OJI/HAN

Scan QR untuk berita selengkapnya



BURT Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan RS Royal Prima bagi Anggota Dewan



FOTO: RIZKI/AHA

Wakil Ketua BURT Dede Indra Permana bersama rombongan tim di RS Royal Prima di Medan, Sumatera Utara.

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT Dede Indra Permana mengunjungi Rumah Sakit (RS) Royal Prima Medan. Kunker ini dalam rangka memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan layanan bagi anggota dewan, khususnya untuk seluruh legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (dapil) Kota Medan, Sumatera Utara.

"Kita memastikan pelayanan rumah sakit Royal Prima dapat meng-handle teman-teman DPR RI yang wilayah Dapil Sumut," kata Dede usai memimpin Kunjungan Kerja BURT

DPR RI ke RS Royal Prima di Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/4).

Politisi dari Fraksi PDIP itu melihat kemampuan RS Royal Prima khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan sudah cukup lengkap, dan sesuai dengan standar



KITA MEMASTIKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA DAPAT MENG-HANDLE TEMAN-TEMAN DPR RI YANG WILAYAH DAPIL SUMUT.

pelayanan bagi anggota dewan. "Menurut saya pelayanan yang ada di sini sudah bagus dan sudah memenuhi persyaratan yang layak," ungkapnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah X itu mengapresiasi sejumlah fasilitas yang ada di RS Royal Prima, khususnya keberadaan spesialisasi terapi stem cell bagi pasien yang saat ini tengah dipromosikan rumah sakit tersebut.

"Tadi kita lihat beberapa fasilitas di sini, ada 16 kamar VVIP, juga beberapa spesialis yang bisa ditangani rumah sakit ini. Ada juga bedah tulang apabila terjadi kecelakaan dan juga sedang dipromosikan tentang stem cell," imbuhnya.

Terapi stem cell sendiri saat ini diyakini sebagai salah satu prosedur pengobatan medis yang mampu mengatasi berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena stem cell atau sel punca yang ada dalam darah dapat membantu memulihkan sel-sel tubuh yang rusak akibat berbagai penyakit kronis.

Untuk itu, Dede mengingatkan kepada Jasindo sebagai pemberi layanan asuransi kesehatan bagi anggota dewan untuk memastikan kemudahan klaim asuransi dan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

"Mungkin Jasindo nanti harus lebih memberikan kemudahan bagi anggota untuk meng-cover layanan kesehatan di sini. Jangan sampai nanti Anggota DPR masuk ke sini tidak bisa di-cover sesuai standar pelayanan bagi teman-teman DPR," pungkask Dede.  [rr/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



BKSAP DPR RI Perkuat Hubungan Diplomatik Indonesia-Lebanon



FOTO: OJI/HAN

Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Parlemen Lebanon dalam rangka melakukan diskusi berbagai potensi kerja sama dan memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Lebanon yang telah berlangsung selama 70 tahun. Tak hanya itu, BKSAP juga menyampaikan dukungan bagi penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri Lebanon.

"Secara garis besar, kedatangan kami untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Lebanon yang sudah berjalan sekitar 70 tahun," ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Putu Supadma

Rudana dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, Senin (15/5).

Menurut Putu, di tingkat global, DPR RI melalui BKSAP menjadi member dari IPU Task Force untuk resolusi perdamaian konflik Rusia-Ukraina. Saat ini, Parlemen RI dan Lebanon sama-sama merupakan Anggota *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dan *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Peran diplomasi parlemen sangat penting untuk menjembatani berbagai kepentingan nasional, sesuai amanat UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 sebagai wujud implementasi UUD RI 1945," ucap Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Karena telah kuatnya hubungan diplomatik Indonesia-Lebanon,

Putu meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan dukungan kepada Kontingen Garuda Indobatt di Lebanon. "Kami berharap kunjungan dari Presiden RI sangat penting untuk memberikan dukungan penuh kepada Kontingen Garuda Indobatt kita di bawah UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*), tentu bersama Menhan," tambahnya.

Putu mengatakan Kontingen Garuda Indobatt menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menjalankan misi perdamaian di bawah UNIFIL. Sehingga, para prajurit terbaik itu perlu didukung secara penuh oleh Pemerintah maupun Parlemen. Kedatangan delegasi BKSAP juga untuk mengapresiasi secara langsung seluruh Kontingen Garuda Indobatt yang bergabung menjadi bagian dari UNIFIL.

"Kontingen Garuda perlu didukung penuh dalam peningkatan alutsista, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan, khususnya kendaraan juga peremajaan genset. Kontingen Garuda Indobatt sebagai representasi bangsa Indonesia dalam menjalankan cita-cita konstitusi punya peran luar biasa besar bagi peningkatan kontribusi Indonesia di tingkat global," tandas Putu.

"Semoga terus memberikan kontribusi bagi penciptaan perdamaian di Lebanon makin kuat, mengedepankan negosiasi, serta menghentikan permusuhan yang tentu sejalan dengan politik luar negeri RI," ujar Putu yang juga selaku Anggota Komisi VI DPR RI ini.

 pun/rdn



Setjen DPR Peroleh Predikat Sangat Baik dengan Indeks Kinerja Anggaran 94,71 dari Kemenkeu

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima penghargaan peringkat ke empat terhadap Kementerian/Lembaga Berkinerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan. Setjen DPR RI capai Indeks Kinerja Anggaran sebesar 94,71 dengan predikat Sangat Baik sepanjang tahun 2022.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, capaian ini menjadi acuan bagi Setjen DPR RI untuk akselerasi yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran yang berkualitas.

"Pertama kami bersyukur atas nama teman-teman di Sekretariat Jenderal DPR yang sudah bekerja keras di semua sektor untuk mencapai indeks kinerja pelaksanaan anggaran ini. Sehingga, dari Kementerian Keuangan (Setjen DPR RI) mendapat penghargaan sebagai salah satu kementerian/lembaga yang mendapat penghargaan ini," ujar Indra Iskandar kepada **Parlementaria** usai menerima penghargaan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Selain menjadi bukti kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, penghargaan ini juga menjadi acuan bagi Setjen DPR RI untuk bekerja lebih baik lagi terutama untuk akselerasi dalam pelaksanaan anggaran berkualitas sesuai amanah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk penggunaan anggaran tahun 2023 yakni 'Belanja berkualitas untuk transformasi ekonomi Indonesia'.

Dalam pelaksanaan belanja



FOTO: BKO/AHA

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai menerima penghargaan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

berkualitas untuk transformasi ekonomi Indonesia tersebut, Setjen DPR RI berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan memberikan dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya melalui kegiatan pemeliharaan gedung.

Selain itu, Indra menyatakan Setjen DPR RI ke depan juga berupaya untuk meminimalisasi adanya revisi-revisi anggaran. Sebab pelaksanaan

anggaran yang baik seharusnya sesuai dengan perencanaan.

Kemudian, Indra menilai dengan adanya penghargaan ini juga menunjukkan bahwa Setjen DPR RI telah berupaya dengan baik dalam mengelola anggaran serta transparan kepada publik. Yaitu sesuai dengan mekanisme acuan dari Kementerian Keuangan serta didampingi dan diawasi oleh Inspektorat Utama DPR RI.

"Saya kira seperti yang telah dibicarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi bahwa masyarakat sekarang ini semua bisa melihat juga. Tapi memang kan DPR ini tentu sebagai lembaga perwakilan rakyat memang banyak hal-hal yang terus akan diperbaiki dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatannya," pungkasnya. [gal/rdn](#)

”

PERTAMA KAMI BERSYUKUR ATAS NAMA TEMAN-TEMAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR.

Scan QR untuk berita selengkapnya





LENSA PARLEMEN



Seminar Nasional 'Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasca Pengundangan UU tentang KUHP' di Jakarta. FOTO: PDT/AHA



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti saat kunjungan ke Rumah Sakit BSH, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/5/2023). FOTO: ARIEF/AHA



Rapat Anggota Tahun (RAT) Koperasi Pegawai Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara. FOTO: DEVI/AHA